

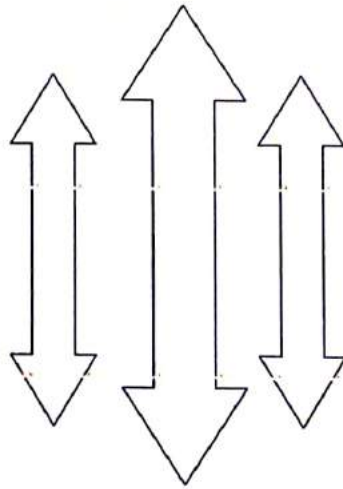


**PERATURAN KALURAHAN KATONGAN**

**NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**



**KALURAHAN KATONGAN**

**KAPANEWON NGLIPAR**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH KATONGAN  
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KATONGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KATONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);



8. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);



15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);  
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);
18. Peraturan Desa Katongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Katongan Tahun 2020 Nomor 03);
19. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 10);
20. Peraturan Desa Katongan 2 Nomor Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 02);
21. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2020 Nomor 07);
22. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan Tahun 2018 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN  
dan  
LURAH KATONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Kalurahan | : Rp. 286.063.000,-          |
| b. Transfer                  | : Rp. 1.887.495.900,-        |
| c. Pendapatan Lain - Lain    | : Rp. <u>57.247.505,-</u>    |
| Jumlah Pendapatan Kalurahan  | : <b>Rp. 2.230.806.405,-</b> |

2. Belanja Kalurahan :

|  |                              |
|--|------------------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kal.  | : Rp. 970.443.430,-          |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan  | : Rp. 770.547.750,-          |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan | : Rp. 33.900.000,-           |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan  | : Rp. 2.525.000,-            |
| e. Belanja Tak Terduga                       | : Rp. <u>463.900.000,-</u>   |
| Jumlah Belanja Kalurahan                     | : <b>Rp. 2.241.316.180,-</b> |
| Surplus/(Defisit)                            | : <b>Rp. (10.509.775,-)</b>  |

3. Pembiayaan Kalurahan :

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan   | : Rp. 52.750.851,-        |
| b. Pengeluaran Pembiayaan  | : Rp. <u>0,-</u>          |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | : <b>Rp. 52.750.851,-</b> |

4. Silpa : **Rp. 42.241.076,-**



Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Pemerintah Kalurahan Katongan Tahun Anggaran 2020.
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2020.
- c. Lampiran III. Program Sektor dan Program Daerah Yang Masuk Ke Kalurahan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Katongan

Pada tanggal 16 Februari 2021

LURAH,



JUMAWAN

Diundangkan di Katongan  
pada tanggal 16 Februari 2021

CARIK,

  
H A R I N O

Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2021 Nomor 3

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KALURAHAN KATONGAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

Laporan Keuangan  
 Pemerintah Kalurahan Katongan  
 Kapanewon Nglipar  
 Kabupaten Gunungkidul  
 Tahun Anggaran 2020

Daftar Isi

|   | <i>hal.</i> |
|---|-------------|
| I. Laporan Realisasi APBKal .....   | 2           |
| II. Catatan Atas Laporan Keuangan   |             |
| A. Informasi Umum .....   | 3           |
| B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan .....                                 | 3           |
| C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran                                 |             |
| 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas .....                                       | 3           |
| 2. Pendapatan Asli Desa .....   | 3           |
| 3. Dana Desa .....  | 3           |
| 4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah .....                     | 3           |
| 5. Alokasi Dana Desa .....  | 4           |
| 6. Bantuan Keuangan Propinsi .....  | 4           |
| 7. Bantuan Keuangan Kabupaten .....                                       | 4           |
| 8. Pendapatan lain .....  | 4           |
| 9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa .....                   | 4           |
| 10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa .....                     | 5           |
| 11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa .....                    | 5           |
| 12. Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa .....                 | 5           |
| 13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Des ..... | 5           |
| 14. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Ekonomi .....                     | 5           |
| 15. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) .....         | 6           |
| 16. Pembiayaan .....  | 7           |
| 17. Aset Kalurahan .....  | 7           |
| 18. Penyertaan Modal .....  | 7           |

Lampiran :

Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Kalurahan



**LAPORAN REALISASI APB KALURAHAN  
PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN  
KAPANEWON NGLIPAR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2020**

|  | Anggaran             | Realisasi            | Lebih/ Kurang       |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>  |                      |                      |                     |
| Pendapatan Asli Kalurahan  | 311.737.000          | 288.063.000          | (25.674.000)        |
| Pendapatan Transfer  |                      |                      |                     |
| Dana Desa  | 966.309.000          | 966.309.000          | 0                   |
| Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah                     | 49.541.500           | 49.541.500           | 0                   |
| Alokasi Dana Desa  | 571.645.400          | 571.645.400          | 0                   |
| Bantuan Keuangan Propinsi  | 250.000.000          | 250.000.000          | 0                   |
| Bantuan Keuangan Kabupaten                                       | 50.000.000           | 50.000.000           | 0                   |
| Pendapatan Lain  | 58.951.091           | 57.247.505           | (1.703.586)         |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>   | <b>2.258.183.991</b> | <b>2.230.806.405</b> | <b>(27.377.586)</b> |
| <b>BELANJA</b>   |                      |                      |                     |
| Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa                           | 999.345.830          | 970.443.430          | 28.902.400          |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                              | 803.884.000          | 770.547.750          | 33.336.250          |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa                             | 35.750.000           | 33.900.000           | 1.850.000           |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa                              | 6.255.012            | 2.525.000            | 3.730.012           |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | 488.700.000          | 463.900.000          | 1.800.000           |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>  | <b>2.310.934.842</b> | <b>2.241.316.180</b> | <b>69.618.662</b>   |
| <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>   | <b>(52.750.851)</b>  | <b>(10.509.775)</b>  | <b>42.241.076</b>   |
| <b>PEMBIAYAAN</b>  |                      |                      |                     |
| Penerimaan Pembiayaan  | 52.750.851,00        | 52.750.851           | 0                   |
| Pengeluaran Pembiayaan   | 0                    | 0                    | 0                   |
| <b>SELISIH PEMBIAYAAN</b>  | <b>52.750.851</b>    | <b>52.750.851</b>    | <b>0</b>            |
| <b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>                                      | <b>0</b>             | <b>42.241.076</b>    | <b>42.241.076</b>   |

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Katongan, 16 Februari 2021

Lurah



JUMAWAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN  
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2020**

A. Informasi Umum

Pemerintah Kalurahan Katongan merupakan Kalurahan di Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 141/108/PG/KPTS/2018 Tanggal 28 November 2018, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Katongan :

1. Lurah : JUMAWAN
2. Carik : HARINO
3. Kaur Danarta : MURTINI

Kantor Pemerintah Kalurahan beralamat di Jl. Nglipar - Ngawen Km. 04 Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBKalurahan sesuai basis kas dengan dasar harga, perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan belanja ja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

|   |            |
|---|------------|
| SILPA Tahun Anggaran 2020   | 42.241.076 |
| Mutasi Potongan Pajak   |            |
| - Saldo awal periode potongan pajak yang belum disetor ke Kas Negara  | 0          |
| - Penerimaan potongan pajak tahun anggaran berjalan                   | 37.683.548 |
| - Setoran pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan          | 37.683.548 |
| - Saldo akhir periode potongan pajak yang belum disetor ke Kas Negara | 0          |
| Saldo Kas per 31 Desember 2020  | 42.241.076 |

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

|  | Anggaran    | Realisasi   | Lebih/ Kurang |
|--|-------------|-------------|---------------|
| a. Hasil Usaha                             | 1.537.000   | 1.513.000   | 24.000        |
| b. Hasil Aset                              | 9.600.000   | 9.600.000   | 0             |
| c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong royong | 0           | 0           | 0             |
| d. Pendapatan Asli Desa lain               | 300.600.000 | 274.950.000 | -25.650.000   |
|  | 311.737.000 | 286.063.000 | -25.626.000   |

Ket. : Minus Pendapatan dikarenakan pengurangan kuota program PTSL

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan Kalurahan yang diperoleh dari APBN, Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

|         | Anggaran    | Realisasi   | Lebih/ Kurang |
|---------|-------------|-------------|---------------|
| Tahap 1 | 390.846.400 | 390.846.400 | 0             |
| Tahap 2 | 144.946.350 | 144.946.350 | 0             |
| Tahap 3 | 144.946.350 | 144.946.350 | 0             |
| Tahap 4 | 96.630.900  | 96.630.900  | 0             |
| Tahap 5 | 188.939.000 | 188.939.000 | 0             |
|         | 966.309.000 | 966.309.000 | 0             |

4. Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

a. Penerimaan Kalurahan yang berasal dari bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah :

|         | Anggaran   | Realisasi  | Lebih/ Kurang |
|---------|------------|------------|---------------|
| Tahap 1 | 21.833.750 | 21.833.750 | 0             |
| Tahap 2 | 13.653.900 | 13.653.900 | 0             |
|         | 35.487.650 | 35.487.650 | 0             |



b. Penerimaan Kalurahan dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya

adalah :

|         | Anggaran   | Realisasi  | Lebih/ Kurang |
|---------|------------|------------|---------------|
| Tahap 1 | 14.053.850 | 14.053.850 | 0             |
| Tahap 2 | 0          | 0          | 0             |
|         | 14.053.850 | 14.053.850 | 0             |

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

|          | Anggaran    | Realisasi   | Lebih/ Kurang |
|----------|-------------|-------------|---------------|
| Tahap 1  | 51.042.000  | 51.042.000  | 0             |
| Tahap 2  | 51.042.000  | 51.042.000  | 0             |
| Tahap 3  | 51.042.000  | 51.042.000  | 0             |
| Tahap 4  | 51.042.000  | 51.042.000  | 0             |
| Tahap 5  | 51.042.000  | 51.042.000  | 0             |
| Tahap 6  | 45.205.000  | 45.205.000  | 0             |
| Tahap 7  | 45.205.000  | 45.205.000  | 0             |
| Tahap 8  | 45.205.000  | 45.205.000  | 0             |
| Tahap 9  | 45.205.000  | 45.205.000  | 0             |
| Tahap 10 | 45.205.000  | 45.205.000  | 0             |
| Tahap 11 | 45.205.000  | 45.205.000  | 0             |
| Tahap 12 | 45.205.400  | 45.205.400  | 0             |
|          | 571.645.400 | 571.645.400 | 0             |

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi DIY adalah :

|  | Anggaran    | Realisasi   | Lebih/ Kurang |
|--|-------------|-------------|---------------|
|  | 250.000.000 | 250.000.000 | 0             |

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Gunungkidul adalah :

|                          | Anggaran   | Realisasi  | Lebih/ Kurang |
|--------------------------|------------|------------|---------------|
| Kegiatan karya bakti TNI | 50.000.000 | 50.000.000 | 0             |

8. Pendapatan Lain

Pendapatan Lain terdiri dari :

|  | Anggaran   | Realisasi  | Lebih/ Kurang |
|--|------------|------------|---------------|
| Penerimaan dari hasil Kerjasama Antar Kalurahan  | 0          | 0          | 0             |
| Penerimaan dari hasil Kerjasama Kalurahan dengan pihak ke tiga                                     | 0          | 0          | 0             |
| Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga  | 0          | 0          | 0             |
| Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Kalurahan | 0          | 0          | 0             |
| Bunga Bank   | 1.190.000  | 1.305.914  | 115.914       |
| Pendapatan Lain Desa yang sah  | 57.761.091 | 55.941.591 | -1.819.500    |
|  | 58.951.091 | 57.247.505 | -1.703.586    |

Ket. : Minus Pendapatan berasal dari kesalahan hitung temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.

9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

|                         | Anggaran           | Realisasi          | Lebih/ Kurang     |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Belanja Pegawai         | 565.659.072        | 562.310.488        | 3.348.584         |
| Belanja Barang dan Jasa | 413.986.758        | 388.432.942        | 25.553.816        |
| Belanja Modal           | 19.700.000         | 19.700.000         | 0                 |
|                         | <u>999.345.830</u> | <u>970.443.430</u> | <u>28.902.400</u> |

Ket. : Surplus belanja berasal dari efisiensi dan penghematan anggaran

10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari :

|                         | Anggaran           | Realisasi          | Lebih/ Kurang     |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Belanja Barang dan Jasa | 45.872.000         | 44.672.000         | 1.200.000         |
| Belanja Modal           | 758.012.000        | 725.875.750        | 32.136.250        |
|                         | <u>803.884.000</u> | <u>770.547.750</u> | <u>33.336.250</u> |

Ket. : Surplus belanja berasal dari efisiensi dan penghematan anggaran

11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

|                         | Anggaran          | Realisasi         | Lebih/ Kurang    |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Belanja Barang dan Jasa | 35.750.000        | 33.900.000        | 1.850.000        |
| Belanja Modal           | 0                 | 0                 | 0                |
|                         | <u>35.750.000</u> | <u>33.900.000</u> | <u>1.850.000</u> |

Ket. : Surplus belanja berasal dari efisiensi dan penghematan anggaran

12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

|                         | Anggaran         | Realisasi        | Lebih/ Kurang    |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Belanja Barang dan Jasa | 6.255.012        | 2.525.000        | 3.730.012        |
| Belanja Modal           | 0                | 0                | 0                |
|                         | <u>6.255.012</u> | <u>2.525.000</u> | <u>3.730.012</u> |

13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2018, Pemerintah Kalurahan melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

|                         | Anggaran           | Realisasi          | Lebih/ Kurang    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Belanja Barang dan Jasa | 465.700.000        | 463.900.000        | 1.800.000        |
| Belanja Modal           | 0                  | 0                  | 0                |
|                         | <u>465.700.000</u> | <u>463.900.000</u> | <u>1.800.000</u> |



4. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

|  | Anggaran           | Realisasi          | Lebih/ Kurang     |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Belanja Pegawai</b>                         |                    |                    |                   |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades          | 39.000.000         | 39.000.000         | 0                 |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 447.095.000        | 447.095.000        | 0                 |
| Jaminan kesehatan Kades dan Perangkat Desa     | 37.314.072         | 33.965.488         | 3.348.584         |
| Tunjangan BPD                                  | 43.450.000         | 43.450.000         | 0                 |
| Tunjangan RT dan RW                            | 0                  | 0                  | 0                 |
|  | <b>566.859.072</b> | <b>563.510.488</b> | <b>3.348.584</b>  |
| <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                 |                    |                    |                   |
| Belanja barang perlengkapan kantor             | 249.766.758        | 232.067.758        | 17.699.000        |
| Belanja jasa honorarium                        | 113.900.000        | 108.249.000        | 7.651.000         |
| Belanja Perjalanan Dinas                       | 8.000.000          | 7.700.000          | 300.000           |
| Belanja jasa sewa                              | 6.000.000          | 6.000.000          | 0                 |
| Belanja operasional Perkantoran                | 23.620.000         | 23.716.184         | -96.184           |
| Belanja pemeliharaan                           | 12.700.000         | 12.700.000         | 0                 |
|  | <b>413.986.758</b> | <b>388.432.942</b> | <b>25.553.816</b> |

Ket. : - Surplus belanja berasal dari efisiensi dan penghematan anggaran

- Defisit belanja berasal dari biaya admin bank

**Belanja Modal**

|  |                    |                    |                   |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Belanja Modal Pengadaan Tanah            |                    |                    | 0                 |
| Belanja Peralatan, Mesin, dan alat berat | 12.178.000         | 12.178.000         | 0                 |
| Belanja Modal Kendaraan                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 274.200.000        | 274.200.000        | 0                 |
| Belanja Modal Jalan                      | 399.390.000        | 367.253.750        | 32.136.250        |
| Belanja Modal Jembatan                   | 0                  | 0                  | 0                 |
| Belanja modal Irigasi/Embung/Drainase    | 39.065.640         | 39.065.640         | 0                 |
| Belanja Modal Jaringan/Instalasi         | 51.500.000         | 51.500.000         | 0                 |
| Belanja Modal Lainnya                    | 0                  | 0                  | 0                 |
|  | <b>776.333.640</b> | <b>744.197.390</b> | <b>32.136.250</b> |

Ket. : - Surplus belanja berasal dari efisiensi dan penghematan anggaran

5. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

|   | Anggaran           | Realisasi          | Lebih/ Kurang     |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>                       |                    |                    |                   |
| Sub bidang penyel belanja Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemdes | 629.190.830        | 625.938.430        | 3.252.400         |
| Sub bidang sarana dan prasarana Pemdes  | 32.400.000         | 32.400.000         | 0                 |
| Sub bidang Admiduk, pencat sipil, statistik, arsip                            | 18.000.000         | 18.000.000         | 0                 |
| Sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan                               | 14.855.000         | 14.855.000         | 0                 |
| Sub Bidang Pertanahan   | 304.900.000        | 279.250.000        | 25.650.000        |
|   | <b>999.345.830</b> | <b>970.443.430</b> | <b>28.902.400</b> |

Ket. : - Surplus belanja berasal dari efisiensi dan penghematan anggaran

Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

|  |                    |                    |                   |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Sub bidang Pendidikan                        | 6.000.000          | 4.800.000          | 1.200.000         |
| Sub bidang Kesehatan                         | 45.750.000         | 45.750.000         | 0                 |
| Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang | 440.434.000        | 408.297.750        | 32.136.250        |
| Sub bidang Kawasan Pemukiman                 | 61.700.000         | 61.700.000         | 0                 |
| Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup    | 0                  | 0                  | 0                 |
| Sub bidang Perhub, Komunikasi dan Informa    | 0                  | 0                  | 0                 |
| Sub bidang Energi & Sumber Daya Mineral      | 0                  | 0                  | 0                 |
| Sub bidang Pariwisata                        | 250.000.000        | 250.000.000        | 0                 |
|  | <b>803.884.000</b> | <b>770.547.750</b> | <b>33.336.250</b> |

Ket. : - Surplus belanja berasal dari efisiensi dan penghematan anggaran

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

|   |                   |                   |                  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Sub bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 3.000.000         | 3.000.000         | 0                |
| Sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan                                 | 21.900.000        | 21.900.000        | 0                |
| Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga                                  | 3.000.000         | 3.000.000         | 0                |
| Sub bidang Kelembagaan Masyarakat                                   | 7.850.000         | 6.000.000         | 1.850.000        |
|   | <b>35.750.000</b> | <b>33.900.000</b> | <b>1.850.000</b> |

Ket. : - Surplus belanja berasal dari efisiensi dan penghematan anggaran

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Sub bidang Kelautan dan Perikanan                   | 0                | 0                | 0                |
| Sub bidang Pertanian dan Peternakan                 | 0                | 0                | 0                |
| Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan | 0                | 0                | 0                |
| Sub bidang Pemberd Perempuan, Perlin anak & Klg     | 6.255.012        | 2.525.000        | 3.730.012        |
| Sub bidang Koperasi, UMKM                           | 0                | 0                | 0                |
| Sub bidang dukungan Penanaman Modal                 | 0                | 0                | 0                |
| Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian            | 0                | 0                | 0                |
|   | <b>6.255.012</b> | <b>2.525.000</b> | <b>3.730.012</b> |

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

|                                   |                    |                    |                  |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Sub bidang Penanggulangan Bencana | 0                  | 0                  | 0                |
| Sub bidang Keadaan Darurat        | 0                  | 0                  | 0                |
| Sub bidang Keadaan Mendesak       | 465.700.000        | 463.900.000        | 1.800.000        |
|                                   | <b>465.700.000</b> | <b>463.900.000</b> | <b>1.800.000</b> |

16. Pembiayaan

Jumlah Netto Pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

|                                     | Anggaran          | Realisasi         | Lebih/ Kurang |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Penerimaan Pembiayaan               | 52.750.851        | 52.750.851        | 0             |
| Pengeluaran Pembiayaan              | 0                 | 0                 | 0             |
|                                     | <b>52.750.851</b> | <b>52.750.851</b> | <b>0</b>      |
| Penerimaan Pembayaan terdiri dari : |                   |                   |               |
| 1. SILPA tahun anggaran sebelumnya  | 52.750.851        | 52.750.851        | 0             |
| 2. Pencairan Dana Cadangan          | 0                 | 0                 | 0             |
|                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      |



17. Aset Kalurahan

Perolehan Aset Kalurahan adalah sebagai berikut ;

|                               | 2019                 | 2020                 | Penambahan/<br>Pengurangan |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Tanah                         | 160.000.000          | 160.000.000          | 0                          |
| Peralatan dan Mesin           | 231.174.150          | 243.352.150          | 12.178.000                 |
| Gedung dan Bangunan           | 2.744.573.300        | 3.018.773.300        | 274.200.000                |
| Jalan, Jaringan dan Instalasi | 4.679.610.588        | 5.137.429.978        | 457.819.390                |
| Aset tetap lainnya            | 250.000.000          | 250.000.000          | 0                          |
| Konstruksi dalam pengerjaan   | 0                    | 0                    | 0                          |
|                               | <b>8.065.358.038</b> | <b>8.809.555.428</b> | <b>744.197.390</b>         |

Rincian Aset Tetap untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal

|             | 2019       | 2020       | Penambahan/<br>Pengurangan |
|-------------|------------|------------|----------------------------|
| BUMDes 2020 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0                          |
|             | 50.000.000 | 50.000.000 | 0                          |

Ket. : - Tidak ada penyertaan modal di tahun 2020



Katongan, 16 Februari 2021

Lurah Katongan

JUMAWAN























LAMPIRAN III  
 PERATURAN KALURAHAN KATONGAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE KALURAHAN

Tanggal : 31 DESEMBER 2020  
 Kalurahan : KATONGAN  
 Kapanewon : NGLIPAR  
 Kabupaten : GUNUNGKIDUL  
 Propinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No    | Program                                      | Kegiatan |   |     |        | Anggaran       |             |
|-------|--|----------|---|-----|--------|----------------|-------------|
|       |  | Jenis    | Lokasi  | Vol | Satuan | Jumlah         | Sumber Dana |
| 1     | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA     |          |   |     |        | 0              |             |
| 2     | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA          |          |   |     |        | 19.634.000.000 |             |
| a.    | Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Bencana |          |   |     |        |                |             |
|       | - Pembangunan Jembatan Teleng                |          | Pakuhan Kepuhsari   | 1   | paket  | 10.000.000.000 | APBN        |
|       | - Pembangunan Jembatan Jeruklegi             |          | Padukuhan Jeruklegi                                       | 1   | paket  | 9.600.000.000  | APBN        |
| b.    | Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya   |          |   |     |        |                |             |
|       | - Bantuan Stimulan RTLH                      |          | Kepuhsari, Nglebak, Perbutan, Jeruklegi, Ngrandu, Klegung | 20  | paket  | 34.000.000     | APBD DIY    |
| 3     | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA         |          |   |     |        | 0              |             |
| 4     | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA          |          |   |     |        | 0              |             |
| Total |  |          |   |     |        | 19.634.000.000 |             |

Katongan, 16 Februari 2021  
 Lurah  






PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN

KAPANEWON NGLIPAR

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Nglipar – Ngawen Km.05, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta

PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN  
DAN  
LURAH KATONGAN  
TERHADAP PERATURAN DESA KATONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
KALURAHAN KATONGAN KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 3/BPKal/2021

NOMOR : 3/Pemkal/2021

Pada hari ini **selasa** tanggal **enam belas** bulan **februari** tahun **dua ribu dua puluh satu** bertempat di Balai Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan Katongan menyetujui bersama terhadap :  
**PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

Naskah peraturan desa sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Katongan dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan dan Lurah Katongan.

Ketua BPKal Katongan  
  
SAMADI HARTO WIHARJO  


Lurah Katongan  
  
MAWAN  




PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN  
KAPANEWON NGLIPAR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

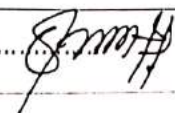

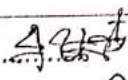

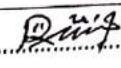
Alamat : Jl. Nglipar - Ngawen Km.05, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta

DAFTAR HADIR  
SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

Hari : Selasa  
Tanggal : 16 Februari 2021  
Tempat : Balai Kalurahan Katongan

| No | Nama                   | Jabatan  | TandaTangan |
|----|------------------------|--|-------------|
| 1  | SAMADI HARTO WIHARJO   | Ketua BPKal  |             |
| 2  | SUROTO, S.Sos          | Wakil Ketua BPKal  |             |
| 3  | SUKIRMANTORO, SPd      | Sekretaris BPKal   | 3.....      |
| 4  | TUKARJO                | Kabid Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan BPKal | 4.....      |
| 5  | WASIAT                 | Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat BPKal   | 5.....      |
| 6  | SUKIMIN                | Anggota BPKal  | 6.....      |
| 7  | KISMI SULJANA, AMK. AK | Anggota BPKal  | 7.....      |
| 8  | SAMTA                  | Anggota BPKal  | 8.....      |
| 9  | RINA SRI LISTIANA      | Anggota BPKal  | 9.....      |
| 10 | JUMAWAN                | Lurah  | 10.....     |
| 11 | HARINO                 | Carik  | 11.....     |
| 12 | IMAN SANTOSA           | Jagabaya   | 12.....     |
| 13 | NGATIJO                | Ulu - Ulu  | 13.....     |
| 14 | WAWAN GUNARJO, SPdI    | Kamituwa   | 14.....     |
| 15 | MURTINI                | Kaur Danarta   | 15.....     |



|    |                     |                       |   |
|----|---------------------|-----------------------|---|
| 16 | AZEF KURNIAWAN      | Kaur Tata Laksana     | 16.....   |
| 17 | YUNIARTI            | Kaur Pangripta        | 17.....  |
| 18 | SUMIJA, SIP         | Staf Pamong Kalurahan | 18.....   |
| 19 | SUDIANTO            | Staf Pamong Kalurahan | 19.....  |
| 20 | SUNARNO             | Staf Pamong Kalurahan | 20.....  |
| 21 | RIKA DWI KURNIAWATI | Staf Pamong Kalurahan | 21.....  |